



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348 Faksimile (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2 /Bua.UKPBJ/5/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Pembentukan Pokja Pemilihan  
Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta, 02 Mei 2024

Yth.

1. Sekertaris Dirjen Badan Peradilan Umum MA. R.I
2. Sekertaris Dirjen Badan Peradilan Agama MA. R.I
3. Sekertaris Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA. R.I
4. Sekertaris Kepala Badan Pengawasan MA. R.I
5. Sekertaris Kepala Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan MA. R.I
6. Sekertaris Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
7. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 272/SEK/SK.PL1.1/III/2024 tentang penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) Pada Mahkamah Agung R.I. bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar saudara menginvestarisir paket-paket pengadaan baik pada satuan kerja saudara maupun Pengadilan Tingkat Pertama yang belum dilaksanakan proses pemilihan di wilayah hukum satuan kerja saudara;
2. Mengusulkan nama-nama Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten di bidang pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan ;
3. Jika dalam suatu daerah tidak terdapat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa maka dapat ditunjuk Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang terdekat;
4. Daftar usulan Pokja Pemilihan tersebut, kami terima melalui Aplikasi E-Prima;
5. Penunjukan Pokja Pemilihan merupakan kewenangan dari Kepala UKPBJ Mahkamah Agung RI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa  
Mahkamah Agung RI,



Sahwan ♪

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung (sebagai laporan);
2. Arsip.